

## SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA TERHADAP AKUNTABILITAS PUBLIK

Nur Laila Yuliani<sup>1</sup> dan Barkah Susanto<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Magelang

email: nurlailay.feummgl78@gmail.com

email: imajidayasal@gmail.com

### *Abstract*

*The purpose of this study is to examine the effect of local financial management information system and the implementation of performance-based budgeting toward local government performance and public accountability. This research was motivated by empirical studies of local government performance and public accountability that are still diverse and inconclusive. Moreover, the performance assessment of local governments increasingly important as accountability to the central government and society. The research sample consisted of 74 employees of SKPD in Magelang City Government. SEM PLS used for analysis in this study. This study provides evidence that the local financial management information system and the implementation of performance-based budgeting have a positive effect on the performance of local government and public accountability. Furthermore, the good performance of local governments can increase the value of public accountability.*

**Keywords:** *Local Financial Management Information System, Implementation of Performance-Based Budgeting, Performance of Local Government, Public Accountability.*

### 1. PENDAHULUAN

Undang-undang No 32 dan No 34 Tahun 2004, tentang otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah, memberikan wewenang yang luas bagi daerah untuk menyelenggarakan pemerintah yang baik dan bersih. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas kepada publik. Pendelegasian kewenangan tersebut disertai dengan penyerahan dan pengalihan pendanaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia (SDM) dalam kerangka Desentralisasi Fiskal. Kewenangan pendanaan yang diserahkan tersebut dapat dilakukan dengan dua cara yaitu mendayagunakan potensi keuangan daerah sendiri dan mekanisme perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah serta antar Daerah. Kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri dilakukan dengan wadah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sumber utamanya adalah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sedangkan pelaksanaan perimbangan keuangan dilakukan melalui Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.

Reformasi dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah juga dilakukan disamping reformasi anggaran daerah. Hal tersebut dilakukan atas dasar berlakunya UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 25 Tahun 1999 jo UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 33 Tahun 2004. Reformasi yang dilakukan dengan menggunakan pola penganggaran berbasis kinerja dan laporan pertanggungjawaban yang juga bersifat kinerja. Melalui sistem penganggaran berbasis kinerja ini penetapan besarnya alokasi anggaran daerah lebih mempertimbangkan nilai uang (*value for money*) dan nilai uang yang mengikuti fungsi (*money follow function*) sesuai dengan kebutuhan riil setiap unit kerja. Kegagalan dalam pencapaian kinerja menjadi ukuran untuk melakukan perbaikan pada masa yang akan datang. Sementara keberhasilan atas kinerja membutuhkan suatu penghargaan untuk dapat meningkatkan produktivitas serta untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat atau publik terhadap pelaksanaan pemerintah.

Manajemen bertanggung jawab kepada masyarakat karena dana yang digunakan dalam penyediaan layanan berasal dari masyarakat baik secara langsung (diperoleh dengan mendayagunakan potensi keuangan daerah sendiri), maupun tidak langsung (melalui mekanisme perimbangan keuangan). Pola pertanggungjawaban pemerintah daerah sekarang ini lebih bersifat horisontal di mana pemerintah daerah bertanggung jawab baik kepada DPRD maupun kepada masyarakat luas (*dual horizontal accountability*). Namun demikian, pada kenyataannya sebagian besar pemerintah daerah lebih menitikberatkan pertanggungjawabannya kepada DPRD daripada masyarakat luas (Mardiasmo, 2003).

Penelitian tentang sistem informasi pengelolaan keuangan, anggaran berbasis kinerja, kinerja dan akuntabilitas pemerintah daerah telah banyak dilakukan. Kloot (1999) yang meneliti mengenai pengukuran

kinerja dan akuntabilitas di pemerintah Lokal victoria Australia yang menemukan bahwa ukuran kinerja secara finansial hanya dapat mengukur sebagian kecil kinerja pemerintahan sehingga diperlukan adanya ukuran kinerja secara non finansial. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa penggunaan ukuran kinerja berhubungan dengan peningkatan akuntabilitas pemerintahan. Pemberian pelayanan terhadap konsumen dan kualitas merupakan dua area ukuran kinerja non finansial yang sedang dikembangkan saat ini. Sejalan dengan hasil penelitiannya Akbar, dkk (2010) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengukuran kinerja pada pemerintah daerah di Indonesia, menunjukkan bahwa ada empat faktor yang mempengaruhi dalam perkembangan indikator kinerja, yaitu kesulitan metrik (ukuran), pengetahuan teknis, komitmen manajemen, dan kepentingan pihak legislatif. Dari empat faktor tersebut, faktor legeslatif yang sangat berpengaruh sangat kuat, serta mengemukakan faktor yang paling kuat dalam akuntabilitas internal dan eksternal adalah komitmen manajemen.

Penelitian Rohman (2009) tentang pengaruh implementasi sistem akuntansi, pengelolaan keuangan daerah terhadap fungsi pengawasan dan kinerja pemerintah daerah menunjukkan hasil bahwa implementasi sistem akuntansi dan pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap fungsi pengawasan dan kinerja pemerintah daerah. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Putra (2010) yang meneliti tentang pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja dan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja SKPD di pemerintah Kabupaten Simalungun menunjukkan hasil bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja dan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja SKPD. Sedangkan penelitian Maroki (2010) tentang pengaruh implementasi *e-government* dan penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah provinsi Sulawesi Utara. Penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa implementasi *e-government* dan penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Propinsi Sulawesi Utara.

Penelitian ini berusaha memberikan kontribusi pengetahuan dengan menjelaskan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja dan akuntabilitas publik di Pemerintah Kota Magelang, karena Pemerintah Kota Magelang telah melaksanakan penganggaran berbasis kinerja sesuai dengan PP Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Di samping itu Pemerintah Kota Magelang telah membangun dan mengembangkan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang berbasis komputer yang disebut dengan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah yang sudah diterapkan sejak tahun 2012. Dengan penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah tersebut, setiap pimpinan SKPD dapat memperoleh data dengan cepat berupa berapa besar persentase penyerapan dana masing-masing kegiatan pada masing-masing SKPD dari waktu ke waktu, sehingga diharapkan pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Magelang menjadi semakin baik.

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja pemerintah daerah dan akuntabilitas publik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam bidang akuntansi sektor publik, khususnya dalam hal pengelolaan keuangan daerah untuk meningkatkan tingkat akuntabilitas publik. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi jajaran praktisi di pemerintah daerah, sehingga dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan untuk meningkatkan dan memperbaiki kinerja dan akuntabilitas pemerintah daerah.

## 2. KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### 2.1. Kajian Literatur

Menurut Jensen dan Meckling (1976) *agency theory* merupakan hubungan keagenan sebagai sebuah kontrak dimana satu atau lebih (*principal*) menyewa orang lain (*agent*) untuk melakukan beberapa jasa untuk kepentingan mereka dengan mendelegasikan beberapa wewenang pembuatan keputusan kepada agen. Konflik kepentingan akan muncul dalam pendelegasian tugas yang diberikan kepada agen dimana agen tidak dalam kepentingan untuk memaksimalkan kesejahteraan *principal*, tetapi mempunyai kecenderungan untuk mementingkan diri sendiri dengan mengorbankan kepentingan pemilik. Berdasarkan *agency theory* dapat digambarkan bahwa hubungan rakyat dengan pemerintah dapat dikatakan sebagai hubungan keagenan, yaitu hubungan yang timbul karena adanya kontrak yang ditetapkan oleh rakyat (sebagai *principal*) yang menggunakan pemerintah (sebagai *agent*) untuk menyediakan jasa yang menjadi kepentingan rakyat. Untuk mengawasi perilaku pemerintah serta menyelaraskan tujuan rakyat dan pemerintah, rakyat mewajibkan pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada pemerintah melalui mekanisme pelaporan keuangan secara periodik (Rohman, 2009).

Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu sistem yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk memperoleh informasi tentang pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Sistem

informasi pengelolaan keuangan daerah diperlukan oleh pemerintah daerah sebagai salah satu alat untuk melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang ada pada pemerintahan daerah. Dari sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, pimpinan SKPD dapat memonitor sudah sejauhmana suatu program atau kegiatan telah terlaksana, sudah seberapa besar penyerapan dana atas program atau kegiatan yang telah dilakukan sehingga dapat dinilai apakah program atau kegiatan yang dilakukan sudah ekonomis, efisien dan efektif. Hasil akhir dari sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dapat berupa formulir-formulir yang dibutuhkan para pengelola keuangan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) antara lain laporan berkala maupun laporan tahunan.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan. Pemerintah daerah dalam penyelenggaraannya, dituntut lebih responsif, transparan, dan akuntabel terhadap kepentingan masyarakat (Mardiasmo, 2006). Penerapan anggaran berbasis kinerja di Indonesia dimaksudkan untuk menjawab tuntutan demokratisasi yang mengedepankan pentingnya aspek transparansi dan akuntabilitas dalam bidang pemerintahan dan politik, khususnya bidang pengelolaan keuangan negara (BIGG, 2005). Lebih lanjut, BIGG (2005) menyatakan prinsip-prinsip anggaran berbasis kinerja secara umum didasarkan pada konsep *value for money* (ekonomi, efisiensi, efektivitas) dan prinsip tata pemerintahan yang baik termasuk adanya pertanggungjawaban para pengambil keputusan atas penggunaan uang yang dianggarkan untuk mencapai tujuan, sasaran, dan indikator yang telah ditetapkan. Secara lengkap prinsip-prinsip anggaran berbasis kinerja meliputi: *value for money*, aturan hukum, transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, keadilan, pengikutsertaan, pendelegasian pelayanan, efektivitas dan efisiensi yang berkelanjutan.

Mardiasmo (2002:20) mengemukakan bahwa akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas publik terdiri dari dua macam, yaitu: 1) Akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*), adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR; dan 2) akuntabilitas horisontal (*horizontal accountability*), yaitu pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. Akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horisontal (*horizontal accountability*) bukan hanya pertanggungjawaban vertikal (*vertical accountability*). Tuntutan yang kemudian muncul adalah perlunya dibuat laporan keuangan eksternal yang dapat menggambarkan kinerja lembaga sektor publik. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dengan pendekatan kinerja yang berorientasi pada *output*, dengan menggunakan konsep nilai uang (*value for money*) serta prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Pengukuran kinerja SKPD dalam konteks organisasi pemerintah daerah dilakukan untuk menilai seberapa baik SKPD tersebut melakukan tugas pokok dan fungsi yang dilimpahkan kepadanya selama periode tertentu. Pengukuran kinerja SKPD merupakan wujud dari *vertical accountability* yaitu pengevaluasian kinerja bawahan oleh atasannya dan sebagai bahan *horizontal accountability* pemerintah daerah yaitu kepada masyarakat atas amanah yang diberikan kepadanya.

## 2.2. Pengembangan Hipotesis

### 2.2.1 Pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu sistem yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk memperoleh informasi tentang pengelolaan keuangan pemerintah daerah (Putra, 2010). Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah diperlukan oleh pemerintah daerah sebagai salah satu alat untuk melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang ada pada pemerintahan daerah.

Penerapan SIPKD akan berpengaruh pada sikap dan perilaku para pegawai dalam lingkungan tersebut. Peraturan pemerintah menuntut semua aparat pemerintah untuk mampu mengimplementasikan SIPKD pada masing-masing wilayahnya. Secara positif keberadaan sistem informasi akan menjadi rangsangan (stimulus) dan tantangan bagi individu dalam organisasi untuk bekerja secara lebih baik, yang pada gilirannya berdampak pada kinerja organisasi. Penelitiannya Putra (2010), menunjukkan hasil bahwa sistem informasi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja SKPD. Begitu pula hasil penelitian yang

dilakukan Rohman (2009), menunjukkan bahwa implementasi sistem akuntansi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis pertama adalah:

H<sub>1</sub>: Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

### 2.2.2 Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Anggaran merupakan rencana keuangan yang mencerminkan pilihan kebijakan untuk suatu periode di masa yang akan datang (Baswir, 1998 dalam Antoro, 2006). Penyusunan anggaran berdasarkan suatu struktur dan klasifikasi tertentu adalah langkah penting untuk memperoleh sistem penganggaran yang baik dan berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah dalam mengelola keuangan negara, sebagai alat pengawasan bagi masyarakat terhadap kebijakan dan kemampuan pemerintah. Sistem anggaran berbasis kinerja dipandang tepat untuk memenuhi tujuan tersebut.

Anggaran berbasis kinerja menghubungkan antara pengeluaran (belanja) dengan hasil yang diinginkan sehingga pengeluaran tersebut dapat diprioritaskan dan unit kerja pemerintah dapat bertanggung jawab terhadap hasil pencapaiannya (*Building Institutions for Good Governance*–BIGG, 2005). Anggaran berbasis kinerja mengharuskan pemerintah untuk mempunyai program prioritas yang dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan operasional yang memiliki tolok ukur pencapaian hasil yang jelas. Pemerintah juga dituntut untuk mengalokasikan anggaran yang senantiasa dapat diukur pemanfaatannya agar hemat, berdaya guna dan tepat guna. Penelitian Putra (2010), menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara penerapan anggaran berbasis kinerja dengan kinerja SKPD. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis ke dua:

H<sub>2</sub>: Penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

### 2.2.3 Pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Publik

Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu sistem yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk memperoleh informasi tentang pengelolaan keuangan pemerintah daerah (Putra, 2010). Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah diperlukan oleh pemerintah daerah sebagai salah satu alat untuk melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang ada pada pemerintahan daerah. Konsep akuntabilitas di sektor publik mengacu pada konsep demokrasi, yakni rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi, sedangkan pemerintah adalah pihak yang menjalankan amanah rakyat untuk mengelola sumber daya publik demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, sudah sepantasnya dan sewajibnya pemerintah bertanggung jawab kepada rakyat. Dan dibutuhkan laporan pertanggungjawaban sebagai media akuntabilitas, contohnya pelaporan keuangan.

Parker (1993) menekankan pentingnya laporan tahunan sebagai media komunikasi masa meski laporan tahunan bukanlah satu-satunya sumber informasi tentang kinerja organisasi, namun masih dipandang sebagai sumber penting karena luas cakupan dan ketersediaannya. Informasi yang dikomunikasikan kepada *stakeholder* melalui laporan tahunan adalah fokus dari riset yang merupakan seperangkat alat dalam kerangka kerja akuntabilitas publik (Hooks *et al*, 2002). Penelitian Maroki (2010) menunjukkan hasil bahwa implementasi *e-government* berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Propinsi Sulawesi Utara. Berarti bahwa dengan diimplementasikannya *egovernment* maka akuntabilitas pengelolaan keuangan daerahnya semakin baik. Sedangkan hasil penelitiannya Widyaningsih, dkk. (2011) menunjukkan bahwa efektifitas sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas akuntabilitas keuangan. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis ketiga:

H<sub>3</sub>: Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas publik.

### 2.2.4 Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Publik

Menurut Hatry (1999), penganggaran berbasis hasil atau kinerja akan memungkinkan pengambil keputusan untuk menyediakan dasar bagi akuntabilitas agensi (pemerintah daerah) yang lebih besar dengan menjelaskan bahwa target kinerja yang *reasonable* disusun untuk suatu tahun anggaran tertentu dan kemudian nilai capaiannya dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Dengan penerapan penganggaran berbasis kinerja akan memudahkan pengambil keputusan dalam menentukan prioritas tujuan, sasaran, dan program, kegiatan, dan belanja, memudahkan dalam mengkomunikasikan prioritas pemerintah kepada masyarakat serta dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan anggaran.

Hasil penelitian yang dilakukan Maroki (2010) menunjukkan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Propinsi Sulawesi Utara.

Berarti bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja akan berdampak semakin baiknya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sehingga akuntabilitas publiknya juga baik. Berdasarkan hal tersebut, hipotesis yang keempat dirumuskan sebagai berikut:

H<sub>4</sub>: Penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas publik.

#### 2.2.5 Pengaruh Kinerja Pemerintah Daerah terhadap Akuntabilitas Publik

Pengukuran kinerja SKPD dalam konteks organisasi pemerintah daerah, dilakukan untuk menilai seberapa baik SKPD tersebut melakukan tugas pokok dan fungsi yang dilimpahkan kepadanya selama periode tertentu. Pengukuran kinerja SKPD merupakan wujud dari *vertical accountability* yaitu pengevaluasian kinerja bawahan oleh atasannya dan sebagai bahan *horizontal accountability* pemerintah daerah yaitu kepada masyarakat atas amanah yang diberikan kepadanya. Pengukuran kinerja memiliki kaitan erat dengan akuntabilitas. Untuk memantapkan mekanisme akuntabilitas, diperlukan manajemen kinerja yang didalamnya terdapat indikator kinerja dan target kinerja, pelaporan kinerja, dan mekanisme *reward and punishment* (Ormond and Loffler, 2002). Indikator pengukuran kinerja yang baik mempunyai karakteristik *relevant, unambiguous, cost-effective, dan simple* (Accounts Commission for Scotland, 1998) serta berfungsi sebagai sinyal atau alarm yang menunjukkan bahwa terdapat masalah yang memerlukan tindakan manajemen dan investigasi lebih lanjut.

Kloot 1999 meneliti mengenai pengukuran kinerja dan akuntabilitas di pemerintah Lokal victoria Australia dan menemukan bahwa ukuran kinerja secara finansial hanya dapat mengukur sebagian kecil kinerja pemerintahan sehingga diperlukan adanya ukuran kinerja secara non finansial. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa penggunaan ukuran kinerja berhubungan dengan peningkatan akuntabilitas pemerintahan. Pemberian pelayanan terhadap konsumen dan kualitas merupakan dua area ukuran kinerja non finansial yang sedang dikembangkan saat ini. Berdasarkan keterangan tersebut, hipotesis ke lima adalah:

H<sub>5</sub>: Kinerja pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas publik.

#### 2.2.6 Pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Publik melalui Kinerja Pemerintah Daerah

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Stanbury, 2003 dalam Bastian (2006). Akuntabilitas manajerial merupakan bagian terpenting untuk menciptakan kredibilitas manajemen pemerintah daerah. Konsep akuntabilitas mencakup proses untuk menunjukkan apakah dana publik telah digunakan secara efisien dan efektif. Pemerintah pusat maupun daerah, harus dapat menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik yaitu hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi, dan hak untuk didengar aspirasinya.

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Apabila pengelolaan keuangan daerahnya baik, maka akuntabilitas pengelolaan keuangannya juga baik, sehingga kinerja pemerintah daerah pun semakin baik. Pengukuran kinerja SKPD dalam konteks organisasi pemerintah daerah, dilakukan untuk menilai seberapa baik SKPD tersebut melakukan tugas pokok dan fungsi yang dilimpahkan kepadanya selama periode tertentu. Pengukuran kinerja SKPD merupakan wujud dari *vertical accountability* yaitu pengevaluasian kinerja bawahan oleh atasannya dan sebagai bahan *horizontal accountability* pemerintah daerah yaitu kepada masyarakat atas amanah yang diberikan kepadanya.

Pengukuran kinerja memiliki kaitan erat dengan akuntabilitas. Untuk memantapkan mekanisme akuntabilitas, diperlukan manajemen kinerja yang didalamnya terdapat indikator kinerja dan target kinerja, pelaporan kinerja, dan mekanisme *reward and punishment* (Ormond and Loffler, 2002). Indikator pengukuran kinerja yang baik mempunyai karakteristik *relevant, unambiguous, cost-effective, dan simple* (Accounts Commission for Scotland, 1998) serta berfungsi sebagai sinyal atau alarm yang menunjukkan bahwa terdapat masalah yang memerlukan tindakan manajemen dan investigasi lebih lanjut. Berdasarkan keterangan tersebut, hipotesis ke enam adalah:

H<sub>6</sub>: Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh terhadap Akuntabilitas Publik melalui Kinerja Pemerintah Daerah

### 3. METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kota Magelang. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, yaitu mengambil sampel para kepala SKPD, PPK SKPD dan Bendahara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Magelang. Variabel-variabel penelitian tersebut diukur dengan menggunakan instrumen kuesioner yang berisi beberapa pernyataan. Pernyataan-pernyataan dalam kuesioner ini merupakan replikasi yang diambil dari beberapa penelitian sebelumnya dengan mengacu pada landasan teoritis yang berkaitan dengan variabel-variabel penelitian. Berdasarkan pernyataan-pernyataan dari masing-masing variabel penelitian tersebut, responden diminta untuk memberikan penilaian atau pendapat dengan skala Likert 1-5. Angka 1 menunjukkan penilaian atau pendapat sangat tidak setuju (STS) sampai dengan angka 5 yang menunjukkan penilaian/pendapat sangat setuju (SS).

#### 3.1. Teknik Analisis Data

##### 3.1.1 Uji Validitas

Uji validitas bertujuan untuk mengukur kualitas instrumen yang digunakan dan menunjukkan kevalidan atau kesahihan suatu instrumen serta seberapa baik suatu konsep dapat didefinisikan oleh suatu ukuran (Hair *et al.*, 2006). Item kuesioner dikatakan valid, jika di atas 0,4. Validitas instrumen dievaluasi berdasarkan *convergent* dan *discriminant validity* dari indikatornya yang dihitung dengan menggunakan PLS. *Convergent validity* dinilai berdasarkan korelasi (*outer loading*) antara skor item atau indikator (*component score*) dengan skor konstruk.

##### 3.1.2 Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana alat pengukuran tersebut mempunyai akurasi dan ketepatan pengukuran yang konsisten dari waktu ke waktu. Reliabilitas instrumen ditentukan dari nilai *composite reliability* dan *cronbach's alpha* untuk setiap blok indikator. Menurut Chin dalam Ghazali (2006), suatu indikator dikatakan mempunyai reliabilitas yang baik jika nilai *composite reliability* dan *cronbach's alpha* lebih besar dari 0.70.

##### 3.1.3 Pengujian Hipotesis

Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah SEM berbasis komponen (*component-based*) dengan *software smartPLS (Partial Least Square) Ver.2 M3* (Chin, 1998 dalam Ghazali, 2013). Menurut Chin dan Newsted (1999) dalam Ghazali (2013), model PLS sesuai untuk aplikasi-aplikasi prediksi dan pembangunan teori. Penentuan fit atau tidaknya suatu model dalam penelitian ini menggunakan beberapa ukuran yaitu *average path coefficient* (APC), *average R-square* (ARS) dan *average variance inflation factor* (AVIF). Nilai APC dan ARS harus lebih kecil dari 0,05 dan AVIF sebagai indikator multikolinieritas harus lebih besar 5 (Sholichin dan Ratmono, 2013).

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Hasil Penyebaran Kuesioner

Sampel yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah pegawai Pemerintah Daerah Kota Magelang yang mengurus bidang keuangan, yaitu Kepala SKPD, Kabag Keuangan, dan Bendahara. Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah SKPD yang merupakan dinas, badan, kantor yang berada di Kota Magelang. Kuesioner disebar ke 100 responde, sedangkan yang kembali sebanyak 86 kuesioner (*response rate* 72%), tetapi yang bisa digunakan dan diolah dalam penelitian ini hanya berjumlah 74 kuesioner. Sisanya tidak dapat digunakan karena kurang lengkapnya jawaban dan data.

#### 4.2. Uji Validitas

Parameter yang digunakan untuk uji validitas yaitu dengan melihat nilai faktor *loading*. Hasil validitas yang terlihat pada tabel 1 menunjukkan bahwa masing-masing indikator pada suatu konstruk di dalam model pengukuran telah memenuhi syarat. Hal tersebut dapat dilihat dari masing-masing indikator di suatu konstruk berbeda dengan indikator di konstruk lain dan mengumpul pada konstruk tersebut dengan nilai faktor *loading* > 0,4, sehingga indikator yang digunakan dalam penelitian ini semuanya valid.

**Tabel 1**  
**Cross Loading**

	SI	ABK	KNRJA	AP
SI1	0,535	0,435	0,070	0,088
SI2	0,762	0,490	0,001	0,128
SI3	0,849	0,471	0,136	0,165
SI4	0,881	0,474	0,062	0,185
SI5	0,757	0,444	0,079	0,049
SI6	0,581	0,517	0,148	0,063
ABK1	0,212	0,814	0,351	0,060
ABK2	0,464	0,837	0,298	0,072
ABK3	0,467	0,710	0,173	0,064
ABK4	0,093	0,804	0,345	0,062
ABK5	0,413	0,613	0,115	0,230
ABK6	0,127	0,562	0,226	0,302
ABK8	0,194	0,702	0,242	0,260
KNRJA1	0,040	0,004	0,842	0,224
KNRJA2	0,187	0,019	0,879	0,108
KNRJA3	0,052	0,063	0,865	0,313
KNRJA4	0,068	0,140	0,753	0,153
KNRJA5	0,370	0,084	0,746	0,337
KNRJA6	0,439	0,385	0,744	0,052
KNRJA7	0,440	0,275	0,486	0,004
AP1	0,090	0,042	0,363	0,775
AP2	0,095	0,129	0,304	0,610
AP3	0,214	0,186	0,018	0,770
AP4	0,130	0,191	0,214	0,643
AP5	0,008	0,307	0,289	0,769
AP6	0,033	0,060	0,226	0,689
AP7	0,084	0,188	0,230	0,750

#### 4.3. Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana alat pengukuran tersebut mempunyai akurasi dan ketepatan pengukuran yang konsisten dari waktu ke waktu. Reliabilitas instrumen ditentukan dari nilai *composite reliability* dan *cronbach's alpha* lebih besar dari 0.70 (Chin dalam Ghozali (2013)).

**Tabel 2**  
**Pengujian Reliabilitas**

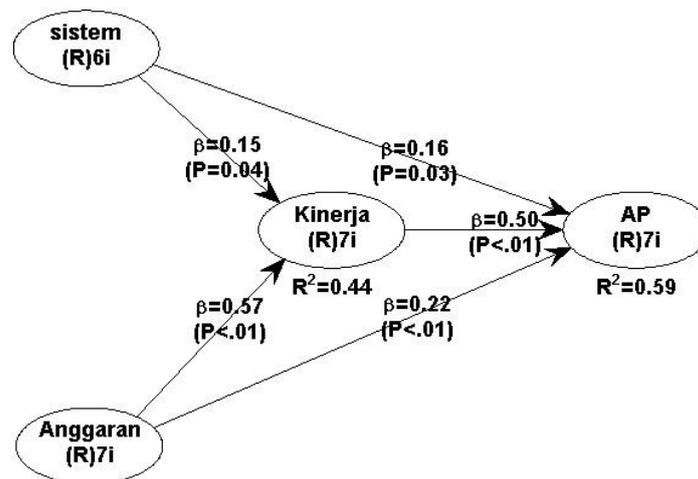
Variabel	Composite Reliability	Cronbach Alpha	Keterangan
Sistem Informasi (SI)	0,875	0,825	Reliabel
Anggaran Berbasis Kinerja (ABK)	0,885	0,846	Reliabel
Kinerja Pemerintah Daerah (KNRJA)	0,908	0,879	Reliabel
Akuntabilitas Publik (AP)	0,881	0,841	Reliabel

#### 4.4. Hasil Analisis

##### 4.1. Uji Model

Hasil uji model menunjukkan bahwa, indikator-indikator model fit dan telah terpenuhi, yaitu nilai  $APC=0,321$  dengan  $p\text{-value} < 0,001$  dan nilai  $ARS=0,513$  dengan  $p\text{-value} < 0,001$ . Demikian juga indikator AVIF sebesar 1,651 dan memenuhi syarat dibawah 5.

##### 4.2. Uji Hipotesis



Gambar 1. Hasil Uji Model Keseluruhan

Berdasarkan gambar 1 dapat dilihat bahwa nilai  $p\text{-value}$  untuk seluruh variabel lebih kecil dari 0,05 dengan nilai koefisien positif, maka H1, H2, H3, H4, H5 dan H6 pada penelitian ini terdukung secara empirik (dapat diterima).

#### 4.5. Pembahasan

##### 4.5.1. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Penelitian ini menemukan bahwa sistem informasi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Berarti semakin baik sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, maka semakin baik pula kinerja pemerintah daerah. Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah diperlukan oleh pemerintah daerah sebagai salah satu alat untuk melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang ada pada pemerintahan daerah. Penerapan SIPKD akan berpengaruh pada sikap dan perilaku para pegawai dalam lingkungan tersebut. Peraturan pemerintah menuntut semua aparat pemerintah untuk mampu mengimplementasikan SIPKD pada masing-masing wilayahnya. Secara positif keberadaan sistem informasi akan menjadi rangsangan (stimulus) dan tantangan bagi individu dalam organisasi untuk bekerja secara lebih baik, yang pada gilirannya berdampak pada kinerja organisasi. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitiannya Putra (2010) dan Rahman (2009), yang menunjukkan hasil bahwa sistem informasi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja SKPD dan implementasi sistem akuntansi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

##### 4.5.2. Penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Artinya semakin baik penerapan anggaran berbasis kinerja, maka semakin baik pula kinerja pemerintah daerah. Penerapan anggaran berbasis kinerja mengharuskan pemerintah untuk mempunyai program prioritas yang dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan operasional yang memiliki tolok ukur pencapaian hasil yang jelas. Di samping itu Pemerintah Daerah juga dituntut untuk mengalokasikan anggaran yang senantiasa dapat diukur pemanfaatannya agar hemat, berdaya guna dan tepat guna. Dengan demikian diharapkan kinerja pemerintah daerah dapat meningkat serta pemerintah dapat

mempertanggungjawabkan hasil pencapaiannya. Hasil penelitian sesuai dengan penelitiannya Putra (2010), yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara penerapan anggaran berbasis kinerja dengan kinerja SKPD.

#### **4.5.3. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas publik.**

Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem informasi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas publik. Berarti sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang baik akan meningkatkan akuntabilitas publik. Sehingga pemerintah daerah dapat menyampaikan informasi keuangan secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat. Sebagaimana diketahui, dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan keleluasaan dan kewenangan dalam mengelola keuangan daerahnya masing-masing. Pengelolaan keuangan daerah memerlukan adanya transparansi dan akuntabilitas, untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan dalam sistem pengelolaan keuangan daerah tersebut. Implementasi dari Sistem informasi keuangan daerah diharapkan dapat memenuhi tuntutan dari masyarakat tentang transparansi dan akuntabilitas dari lembaga sektor publik (Mardiasmo, 2002). Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Maroki (2010) yang menunjukkan hasil bahwa implementasi *egovernment* berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Propinsi Sulawesi Utara. Serta hasil penelitiannya Widyaningsih, dkk. (2011) menunjukkan bahwa efektifitas sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas akuntabilitas keuangan.

#### **4.5.4. Penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas publik.**

Hasil penelitian ini menemukan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas publik. Artinya semakin baik penerapan anggaran berbasis kinerja, maka semakin baik pula akuntabilitas publiknya. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitiannya Antoro (2006) dan Maroki (2010), yang menunjukkan hasil bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas publik. Menurut Hatry (1999), penganggaran berbasis hasil atau kinerja akan memungkinkan pengambil keputusan untuk menyediakan dasar bagi akuntabilitas agensi (pemerintah daerah) yang lebih besar dengan menjelaskan bahwa target kinerja yang *reasonable* disusun untuk suatu tahun anggaran tertentu dan kemudian nilai capaiannya dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Beberapa manfaat yang diperoleh dari penerapan penganggaran berbasis kinerja meliputi: 1) Memudahkan pengambil keputusan dalam menentukan prioritas tujuan, sasaran, dan program, kegiatan, dan belanja; 2) Memudahkan dalam mengkomunikasikan prioritas pemerintah kepada masyarakat; dan 3) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan anggaran. Secara umum prinsip-prinsip anggaran berbasis kinerja didasarkan pada konsep *value for money* (ekonomi, efisiensi, efektivitas) dan prinsip tata pemerintahan yang baik termasuk adanya pertanggungjawaban para pengambil keputusan atas penggunaan uang yang dianggarkan untuk mencapai tujuan, sasaran, dan indikator yang telah ditetapkan.

#### **4.5.5. Kinerja pemerintah daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas publik.**

Hasil analisis menunjukkan bahwa kinerja pemerintah mempunyai pengaruh positif terhadap akuntabilitas publik. Berarti bahwa semakin baik kinerja pemerintah daerah, maka semakin baik pula akuntabilitas publik. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian Kloot (1999) yang menunjukkan dan mengindikasikan bahwa penggunaan ukuran kinerja berhubungan dengan peningkatan akuntabilitas pemerintahan. Pemberian pelayanan terhadap konsumen dan kualitas merupakan dua area ukuran kinerja non finansial yang sedang dikembangkan saat ini. Pengukuran kinerja memiliki kaitan erat dengan akuntabilitas. Untuk memantapkan mekanisme akuntabilitas, diperlukan manajemen kinerja yang didalamnya terdapat indikator kinerja dan target kinerja, pelaporan kinerja, dan mekanisme *reward and punishment* (Ormond and Loffler, 2002). Indikator pengukuran kinerja yang baik mempunyai karakteristik *relevant, unambiguous, cost-effective, dan simple* (Accounts Commission for Scotland, 1998) serta berfungsi sebagai sinyal atau alarm yang menunjukkan bahwa terdapat masalah yang memerlukan tindakan manajemen dan investigasi lebih lanjut.

#### **4.5.6. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh terhadap Akuntabilitas Publik melalui Kinerja Pemerintah Daerah**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dan penerapan anggaran berbasis kinerja dapat berpengaruh langsung pada akuntabilitas publik, sehingga sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dan penerapan anggaran berbasis kinerja dapat berpengaruh terhadap

akuntabilitas publik melalui kinerja pemerintah daerah. Semakin baik sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dan penerapan anggaran berbasis kinerja akan dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah, sehingga akuntabilitas publik pemerintah daerah tersebut juga baik. Menurut Schiavo-Campo and Tomasi (1999), konsep akuntabilitas mencakup proses untuk menunjukkan apakah dana publik telah digunakan secara efisien dan efektif. Pada dasarnya, akuntabilitas adalah pemberian informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus dapat menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik yaitu hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi, dan hak untuk didengar aspirasinya. Di samping itu apabila pengelolaan keuangan daerahnya baik, maka kinerja pemerintah daerah pun semakin baik, sehingga akuntabilitas pengelolaan keuangannya baik juga.

Pengukuran kinerja SKPD dalam konteks organisasi pemerintah daerah, dilakukan untuk menilai seberapa baik SKPD tersebut melakukan tugas pokok dan fungsi yang dilimpahkan kepadanya selama periode tertentu. Pengukuran kinerja SKPD merupakan wujud dari *vertical accountability* yaitu pengevaluasian kinerja bawahan oleh atasannya dan sebagai bahan *horizontal accountability* pemerintah daerah yaitu kepada masyarakat atas amanah yang diberikan kepadanya. Pengukuran kinerja memiliki kaitan erat dengan akuntabilitas. Untuk me- mantapkan mekanisme akuntabilitas, diperlukan manajemen kinerja yang didalamnya terdapat indikator kinerja dan target kinerja, pelaporan kinerja, dan mekanisme *reward and punishment* (Ormond and Loffler, 2002).

## 5. SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa sistem informasi pengelolaan keuangan dan penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah dan akuntabilitas publik. Disamping itu hasil analisis menunjukkan bahwa variabel sistem informasi pengelolaan keuangan dan penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas publik melalui kinerja pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi pengelolaan keuangan dan penerapan anggaran berbasis kinerja itu penting bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja. Dengan kinerja pemerintah daerah yang semakin baik maka akuntabilitas publiknya juga baik, sehingga profesionalisme pemerintah daerah juga meningkat. Beberapa saran yang direkomendasikan untuk penelitian berikutnya, yaitu:

- a. Peneliti berikutnya dapat mencari variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi penggunaan kinerja dan akuntabilitas publik seperti *e-government*, pengendalian internal, manajemen berbasis kinerja.
- b. Memperluas wilayah penelitian agar dapat mengeneralisasi.
- c. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan responden pimpinan SKPD, agar diharapkan dapat mendapatkan pandangan yang berbeda.
- d. Penggunaan *mixed method* sangat disarankan bagi penelitian berikutnya, karena dengan menggunakan teknik ini, maka hasil yang diperoleh dapat digali lebih dalam dan dapat melihat dari sudut pandang yang beragam dan kaya dibandingkan apabila hanya menggunakan satu analisis saja.

## 6. REFERENSI

- [1] Abubakar, A.P.D. 2012. Pengaruh Manajemen Berbasis Kinerja dan *Kepemimpinan* Transformasional terhadap Kinerja dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten Sleman), *Jurnal Program Magister Akuntansi*. Vol. 2 No. 1
- [2] Akbar, Rusdi, R. Pilcher dan B. Perrin. 2010. *Performance Measurement in Indonesia: The Case of Local Government*. [www.afaanz.org/openconf](http://www.afaanz.org/openconf).
- [3] Antoro, S.D. 2006. Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Publik Pemerintah Daerah Studi Empiris Pada Pemerintah Kota/Kab Di Propinsi DIY. *Tesis Program Pasca Sarjana UGM Yogyakarta*
- [4] Asmoko, H. 2006. Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja terhadap Efektivitas Pengendalian. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*. Vol 2. No. 2
- [5] Baridwan, Z. 2003. *Pengukuran Kinerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah dan Akuntabilitas Publik*, Makalah Seminar Nasional Pengukuran Kinerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah. Fakultas Ekonomi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.
- [6] Bastian, I., 2006, *Sistem Akuntansi Sektor Publik*, Edisi: 2, Salemba Empat, Jakarta.
- [7] BPKP.2007. *Akuntabilitas Instansi Pemerintah*. Pusdiklatwas BPKP. Edisi Kelima
- [8] Cooper, D.R. and P.S. Schindler. 2006. *Bussiness Research Methods*. 9thEdition. McGraw-Hill

- [9] Creswell, J.W. 2010. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Edisi Ketiga. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- [10] Departemen Dalam Negeri, 2002, *Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*, Jakarta.
- [11] Flynn, M. 1997, *Public Sector Management*, Prentice Hall.
- [12] Ghozali, I. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*. Cetakan V. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- [13] Hair, J.F, W.C. Black, B.J. Babin. and R.E. Anderson. 2010. *Multivariate Data Analysis: A Global Perspective*. Seventh Edition. Pearson.
- [14] Hartono, J. 2010. *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman (edisi pertama)*. BPFE Yogyakarta
- [15] Hatry, H. 1999, *Performance Measurement*, The Urban Institute, Washington D.C.
- [16] Hooks, Jill and Coy, David and Davey, Howard, 2002, *The Information Gap in Annual Reports*, Accounting, Auditing & Accountability Journal, 2002.
- [17] Jensen, M.C. and W.H. Meckling. 1976. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, October, V.3, No. 4, pp. 305-360.
- [18] Kloot, L. 1999. Performance Measurement and Accountability in Victorian Local Government. *The International Journal of Public Sector Management* Vol. 12 No.7. 565-583
- [19] Kustiani, N.A. 2007. Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Kinerja Fiskal Kabupaten/Kota Di Pulau Jawa. *Tesis* Program Magister Sains Akuntansi UGM Yogyakarta.
- [20] Laudon, K.C., and J.P. Laudon, 2000, *Organization and Technology in The Networked Enterprise. Management Information System*, Six Edition, International Edition. www.prenhall.com/laudon.
- [21] Mardiasmo, 2002, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit ANDI Yogyakarta.
- [22] \_\_\_\_\_, 2003, Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah, Makalah Seminar Nasional dalam rangka Dies Natalis ke-8 MEP UGM Yogyakarta
- [23] \_\_\_\_\_, 2006, Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana *Good Governance*, *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, Vol. 2. No.1.
- [24] Moroki, F.O. 2010. Pengaruh Implementasi *E-Government* dan Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. *Tesis* Program Pasca Sarjana UGM Yogyakarta.
- [25] Mutsqa, U. 2011. Dampak Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Efisiensi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Perbandingan Sumatera dan Jawa. *Tesis*. Program Pasca Sarjana UGM Yogyakarta.
- [26] Ormond, D., and Loffler, E. 2002. New Public Management: What to Take and What to Leave. *Public Management Service*. OECD
- [27] Parhusip, P.T. 2007. Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Publik dan Transparansi di Pemerintah Kota atau Kabupaten yang Terjadi Pemekaran. *Tesis* Program Pasca Sarjana UGM Yogyakarta.
- [28] Parker, W.C., 1993, *Performance Measurement in the Public Sector*. State of Utah.
- [29] Patton, J.M. 1992. Accountability and Governmental Financial Reporting. *Financial Accountability and Management*.
- [30] Putra, T.S. 2010. Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja SKPD Di Pemerintah Kabupaten Simalungun. *Tesis*. Sekolah Pasca Sarjana USU.
- [31] Rohman, A. 2009. Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Fungsi Pengawasan dan Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*. Vol.9 No. 1
- [32] Rohman, A. 2009. *Akuntansi Sektor Publik, Telaah dari Dimensi: Pengelolaan Keuangan Daerah, Good Governance, Pengendalian, Pengawasan, dan Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah*. BP-Universitas Diponegoro.
- [33] Schiavo-Campo, S., and D. Tomasi. 1999, *Managing Government Expenditure*, Asia Development Bank, Manila.
- [34] Scott, W. R. 2003. *Financial Accounting Theory*. New Jersey: Prentice-Hall International, Inc.
- [35] Scott, R. W. 1987 The Adolescence of Institutional Theory. *Administrative Science Quarterly* 32 (4): 493-511

- [36] Sekaran, Uma and R. Bougie. 2010. *Research Methods for Business: A Skill Building Approach*. 5th Edition. John Wiley & Sons Ltd
- [37] Smith, P, 1996, *Measuring Outcome in Public Sector*, Taylor & Francis Publisher, London.
- [38] Sholihin, M. dan D. Ratmono. 2013. *Analisis SEM-PLS dengan WarpPLS 3.0*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- [39] Tuasikal, A, 2007, Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi dan Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik*, Vol.08, No.01.
- [40] Widyaningsih, A. A. Triantoro dan L.S. Wiyantoro. 2011. Hubungan Efektivitas Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Pengendalian Intern dengan Kualitas Akuntabilitas Keuangan: Kualitas Informasi Laporan Keuangan sebagai Variabel Intervening. *Simposium Nasional Akuntansi XIV*. Aceh.
- [41] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*.
- [42] -----, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*.
- [43] -----, *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*.
- [44] -----, *Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah*.
- [45] -----, *Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- [46] -----, 2006, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*, Jakarta.
- [47] -----, 2007, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*, Jakarta.
- [48] -----, 2005. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah*